

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media massa menyandang predikat sebagai pilar ke-empat demokrasi, seiring dengan tugas dan fungsinya menyebarkan informasi, edukasi, manajemen konflik, dan juga hiburan. Di era Orde Baru, ketika keran media massa ditutup, peran media massa tidak seluas saat ini. Salah satu peran penting media massa adalah konstruksi sosial media massa atas reformasi birokrasi. Dibuatnya UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, mendorong hadirnya negara sebagai fasilitator untuk mendorong demokrasi dalam bidang informasi. Salah satu isi regulasinya adalah kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, yang mengutamakan kepentingan publik dalam mekanisme isi siaran dari lembaga-lembaga penyiaran yang ada.

Informasi yang diberikan media massa kepada khalayak publik menjadi referensi utama untuk masyarakat mengenal dunia. Tidak hanya mengenal, bahkan berpengaruh pada sikap yang akan diambil, ini yang kemudian juga disebut sebagai membangun opini publik. Ini menegaskan bahwa peran utama media massa dalam sistem demokrasi bukan hanya memberikan informasi saja, tetapi juga sebagai sarana edukasi, dan kekuatan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kehidupan bangsa. Pada semangat transparansi, media massa telah mendorong pelaksanaan birokrasi di daerah dan di pusat semakin terbuka, terutama pada keberanian birokrasi untuk dikontrol oleh pihak lain di luar birokrasi.

Konstruksi sosial media massa telah berhasil mengeksplor berbagai potensi di daerah terutama potensi sumber daya manusia, sehingga potensi tersebut yang dahulunya hanya dapat dimanfaatkan oleh kepentingan lokal, saat ini dapat dimanfaatkan oleh kepentingan bangsa secara luas. Alih-alih memberikan ruang transparansi untuk kritik dan masukan, pemerintah sekarang lebih fokus pada bagaimana memastikan medium tempat publik bertukar informasi, memuat hal-hal baik tentang mereka. Pemimpin politik, pemimpin negara dan organisasi lainnya yang ingin mendapatkan dukungan dari bawahan atau rakyat secara luas, harus memiliki pencitraan yang kuat terhadap diri pribadinya.

Sering dijumpai *overrated* dari media massa terhadap suatu instansi pemerintah atau tokoh politik tertentu. Hal itu dapat terjadi ketika media massa bahkan ruang redaksi dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal. Cara media massa memberitakan suatu instansi atau tokoh politik akan berpengaruh pada pendapat publik secara luas. Redaksi suatu media massa memiliki agenda setting untuk menentukan mana yang dibutuhkan atau diinginkan publik untuk dikonsumsi sebagai pengetahuan publik. Termasuk, menentukan mana yang akan dianggap penting dan mana yang tidak. Lebih spesifik, dalam momentum Pemilu, kerap dijumpai satu media massa yang hanya memberitakan calon A dan tidak dengan yang lainnya. Atau, memberitakan calon A secara dominan ketimbang calon B.

Maka tidak heran, media massa menjadi satu organisasi yang patut digandeng ketika kontestasi politik berlangsung. Apalagi di ranah politik lokal, media massa akan lebih mudah dan spesifik dalam mengulas sang tokoh politik untuk kemudian disajikan dalam bentuk konten kepada publik. Tokoh politik tersebut akan

berinvestasi besar-besaran agar dirinya dipajang lebih lama dan lebih banyak dalam medium yang dimiliki suatu media massa. Seperti yang terlihat di laman web kabarpriangan.com, memberitakan secara menyeluruh informasi pribadi Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah.

Cheka adalah pengganti untuk Wali Kota Tasikmalaya sebelumnya, Muhammad Yusuf. Dirinya adalah hasil pilihan langsung dari Kementerian Dalam Negeri melalui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-6113 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 7 November 2022, memutuskan, menetapkan, dan mengangkat DR. Cheka Virgowansyah, S.SPT., M.E, sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya.

Dalam berita yang diunggah Kabar Priangan dalam portal daringnya, menjelaskan secara lengkap profile penjabat Wali Kota Tasikmalaya tersebut. “Dirinya menjabat Wali Kota Tasikmalaya hingga tahun 2024 di masa Pilkada mendatang, pria tersebut berasal dari Palembang kelahiran 19 September 1979. Dirinya pernah mengenyam pendidikan program Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia.” (Maldini, 2022).

Penetapan ini menjadikan PJ Kota Tasikmalaya. Dirinya seolah dibebankan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memajukan kota santri ini, sehingga pria kelahiran Palembang itu banyak disorot sebagai orang baru yang ditaksir tidak cukup mengenal Kota Tasikmalaya. Banyak yang menduga keterpilihannya ada kaitannya dengan agenda Pemilu 2024 nanti. Meski begitu,

Cheka tetap melakukan pekerjaannya sesuai dengan amanat dan tanggungjawabnya kepada Mendagri. Banyak gebrakan baru yang dilakukan oleh Cheka, transformasi di bidang pelayanan birokrasi hingga urusan sosial tentang sampah. Karena di zaman reformasi birokrasi memungkinkan transparansi dan keterbukaan kritik terhadap pemerintah, hal semacam poster nada kritik pun muncul di Kota Tasikmalaya.

Adapun baliho yang berwarna merah di Jalan HZ Mustofa. Reklame itu berisikan tulisan penolakan terhadap Pejabat Wali Kota Tasikmalaya, Cheka. Kalimat ditulis dalam bahasa sunda dengan warna hitam dan ditebalkan dan berukuran besar, di pojok kiri baliho terdapat sebuah logo padi bertuliskan “Forum Leuwikeris”. Tulisan dalam baliho itu sebagai berikut:

“TI URANG TASIK, KU URANG TASIK, KEUR URANG TASIK...

ARI SILAING SAHA? ULAH SOK PIPILUEUN URUSAN BATUR!

PAIT...PAIT... NYINGKAH KADITUH, KA SABRANG KA PALEMBANG !!!

#PJWALIKOTA” (Nugraha, 2023).

Banyak media lokal memberitakan baliho tersebut, tapi tidak dilakukan oleh Kabar Priangan. Meja redaksinya justru sibuk menambal dengan kebaikan dan nilai positif dari Cheka. Seperti satu contoh judul berita yang mengisaratkan ketulusan Cheka mengurus Kota Tasikmalaya, “Pj Wali Kota Tasikmalaya Kunjungi Kantor PWI Tasikmalaya, Cheka: Saya Akan Mencintai Kota Ini Sepenuh Hati”. Judul itu juga menjawab kekhawatiran masyarakat Kota Tasikmalaya yang meragukan Cheka bukanlah putra daerah. Melalui Kabar Priangan, Cheka membangun

Komunikasi Politik yang cepat dan tepat. “Komunikasi Politik sering juga dibangun untuk mengkontruksi harapan-harapan kepada khalayak (*trust building*) terutama kepada anggota partai politik atau simpatisan yang secara tidak langsung mendukung partai atau elite politik itu,”(Bungin, 2018).

Dari penjelasan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dnegan judul “Media dan Politik Lokal (Analisis Framing Pada Portal Berita Online Kabar Priangan terhadap Pemberitaan PJ Wali Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kabar Priangan Melakukan Pemberitaan terhadap PJ Wali Kota Tasikmalaya?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat dengan tujuan agar memperjelas ruang lingkup penelitian dan untuk menghasilkan uraian yang sistematis. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah, sebatas pembahasan mengenai berita di portal Kabar Priangan yang memuat Penjabat Wali Kota Tasikmalaya sebagai *headline*. Berita-berita tersebut yang terunggah di laman pada November 2022-Januari 2023.

D. Tujuan Penelitian

Penyusun melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Kabar Priangan memberitakan PJ Wali Kota dalam berita politiknya.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait Media dan Politik Lokal, sehingga menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

